

**PENGARUH KINERJA KOMITE AUDIT
TERHADAP MANAJEMEN LABA (DENGAN
MENGUNAKAN *EARNING RESTATEMENT*
SEBAGAI PROKSI DARI MANAJEMEN LABA)**

PRAWITA MANDHEGA RANI

PROF. Dr. H. MUCHAMAD SYAFRUDDIN, MSI. Akt

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of audit committee performance on earning management by using earning restatement as a proxy of earning management. Audit committee characteristics used in this study are audit committee independence, size of audit committee, financial expertise audit committee member and the meetings of the audit committee.

This study use data from 40 BEI (Indonesia Stock exchange) listed companies in 2005 until 2009. Then, collected data are analyzed by using logistic regression analysis.

The results of this study indicate that audit committee independence was significantly negative effect on the occurrence of earnings restatement. While, on the other audit committee characteristics, this study have no evidence that there is significant influence between the characteristics of the earnings restatement.

Keywords: Audit Committee, Corporate Governance, Earning Restatement

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Isu tata kelola perusahaan mulai berkembang sejak adanya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997. Krisis keuangan yang tidak hanya menyerang Indonesia tetapi juga menyerang negara-negara di Asia ini dipandang sebagai akibat dari lemahnya praktik *Good Corporate Governance* di negara-negara Asia (Arifin, 2005).

Kebutuhan akan *Good Corporate Governance* ini semakin menarik perhatian terutama sejak mencuatnya skandal akuntansi yang dilakukan oleh Enron dan Kantor Akuntan Big 5, Arthur Anderson. Adanya skandal ini akhirnya memunculkan kasus-kasus lain yang juga dilakukan oleh perusahaan *high profile* seperti WorldCom, Healthsouth dan Tyco. Di Indonesia, juga terjadi beberapa kasus yang mengindikasikan lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* seperti kasus pada PT. Kimia Farma yang melakukan penggelembungan (*overstated*) laba perusahaan dalam laporan keuangan 2001 (Tempo, 2002). Kasus ini juga mengakibatkan penjatuhan sanksi kepada auditor PT. Kimia Farma karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai SPAP (Bapepam, 2002).

Berbagai upaya dalam penegakan *Good Corporate Governance* telah dipionerkan oleh beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika. Pada tahun 1992 di Inggris, terbentuk Cadbury Committee yang memberikan beberapa rekomendasi dalam menerapkan *corporate governance*. Rekomendasi ini terangkum dalam laporan yang berjudul *The Financial Aspect of the Corporate Governance*. Sedangkan di Amerika, terdapat 10 rekomendasi mengenai *corporate governance* dibuat oleh Blue Ribbon Committee pada tahun 1999 (BRC, 1999).

Di Indonesia, pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan Governance membuat suatu pedoman *good corporate governance* dimana pedoman ini disempurnakan pada tahun 2006. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dasar tentang konsep dan pola pelaksanaan GCG (KNKG, 2001). Dalam

pedoman tersebut, terdapat pedoman untuk pembentukan beberapa komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, salah satunya adalah komite audit.

Komite Audit dibedakan menjadi tiga hal atau karakteristik yaitu komite audit untuk perbankan, BUMN, dan perusahaan publik (Effendi, 2005). Pada kategori perbankan, peraturan tentang komite audit, dalam perbankan disebut dengan Dewan Audit, diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995. Pada perusahaan BUMN hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN. Sedangkan pada perusahaan publik ketentuan komite audit diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000.

Berdasarkan beberapa regulasi-regulasi di atas, Komite Nasional Good Corporate Governance membentuk Task Force Komite Audit untuk membuat suatu pedoman mengenai komite audit di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 2002, Task Force Komite Audit berhasil membuat “Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif”, yang didalamnya dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum suatu komite audit.

Komite Audit yang efektif bekerja sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan Dewan Komisaris. Tugas utama komite audit adalah memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan kontrol internal (KNCG, 2002). Komite audit diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Suatu komite audit ketua oleh seorang Komisaris Independen dan setidaknya-tidaknya memiliki 2 orang anggota.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja komite audit, terdapat beberapa karakteristik komite audit yang bisa digunakan sebagai parameter kinerja. Karakteristik tersebut antara lain struktur komite audit (meliputi independensi, ukuran), pelatihan dan pemahaman komite audit, frekuensi pertemuan dan rapat komite audit, kegiatan komite audit, hubungan komite audit dengan auditor internal, akuntan publik dan manajemen dan peranan komite audit dimasa depan (KNKG).

Salah satu karakteristik krusial yang sangat diperlukan oleh komite audit adalah independensi. Independensi diperlukan untuk menilai kinerja auditor internal, mengatasi konflik auditor eksternal (Agrawal *et al.*, 2005) dan untuk menilai objektivitas dan independensi auditor eksternal (IKAI, 2004). Karakteristik lain yang diperlukan adalah adanya *financial expertise*, jumlah rapat dan ukuran komite audit. *Financial expertise* diperlukan dalam suatu komite audit, karena hal ini terkait dengan tujuan komite audit yaitu memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kerajinan komite audit bisa digunakan parameter jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama satu periode (IKAI, 2004). Dan supaya keanggotaan komite audit lebih efektif lagi, KNKG merekomendasikan jumlah anggota komite audit adalah sebanyak 3-5 orang.

Dalam perkembangannya, sorotan mengenai komite audit semakin berkembang. Peran komite audit dalam upaya untuk menjamin kualitas dari pelaporan keuangan perusahaan telah menjadi suatu pertimbangan yang berarti, terutama setelah maraknya tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dan skandal akuntansi yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia (Lin *et.al.*, 2006), termasuk di Indonesia. Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ini dipicu sejak adanya pengaitan antara nilai perusahaan dengan pelaporan laba, yang selanjutnya hal ini memunculkan insentif ekonomi dan tekanan terhadap manajemen perusahaan supaya dapat menyajikan laba yang baik (Lin *et.al.*, 2006).

Manajemen laba dapat diartikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan manager dengan memanfaatkan adanya asimetri informasi dan munculnya perilaku oportunistik untuk memaksimalkan kesejahteraan dengan cara memodifikasi laba. Terdapat tiga hipotesis motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba yang dikemukakan oleh Zimmerman yaitu *Bonus Plan Hypothesis*, *Debt (Equity) Hypothesis* dan *Political Cost Hypothesis*.

Tindakan manajemen laba ini tentu akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan, sebab salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan

dalam menghasilkan laba (Ghozali dan Anis, 2007). Manajemen laba dapat membiaskan informasi tersebut sehingga mengurangi relevansi dan keandalan dari informasi keuangan tersebut, terutama informasi mengenai laba perusahaan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, sebagian peneliti menggunakan diskresioner akrual sebagai proksi dari manajemen laba, dan ada pula yang menggunakan penyajian kembali laba (*earning restatement*) sebagai proksi dari manajemen laba. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan *earning restatement* sebagai proksi dari manajemen laba.

Penggunaan *earning restatement* ini dikarenakan *earning restatement* merupakan proksi manajemen laba yang lebih mudah diobservasi dan merupakan hasil dari manajemen laba yang agresif (Lin *et.al.*, 2006). Mengutip dua argumen yang dikemukakan oleh Zoe-Vonna Palmrose dan Susan (2004) dalam Agrawal dan Chada (2005) tentang penggunaan *earning restatement* sebagai proksi manajemen laba adalah, yang pertama, *earning restatement* merupakan kegiatan yang langka dilakukan perusahaan. *Earning restatement* tidak seperti diskresioner akrual, dimana kegiatan perusahaan rutin berkaitan dengan diskresioner akrual. Yang kedua, keterjadian dari *earning restatement* adalah suatu konstruksi yang akademis dalam memanipulasi laba. “Tak ada asap tanpa api”, hal ini menunjukkan bahwa laba memang dimanipulasi oleh manajemen.

Penelitian ini membuktikan bahwa independensi komite audit mampu mengeliminasi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk karakteristik komite audit yang lain yaitu ukuran komite audit, keahlian di bidang keuangan dan jumlah pertemuan (rapat) komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengeliminasi manajemen laba.

2. TELAAH TEORI

2.1 Teori agensi

Agency Theory atau Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Hubungan agensi ini didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau lebih orang, dimana *principal* mengikat orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan sesuai kepentingan *principal* yang melibatkan

pendelegasian beberapa otoritas untuk membuat keputusan bagi agen (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal*, disebut juga pemberi wewenang, dapat diartikan sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham dan agen adalah, pihak yang diberi wewenang, dapat diartikan sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Berdasarkan teori dijelaskan bahwa pihak manajemen dalam bekerja menjalankan perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan pemilik perusahaan.

Principal akan selalu tertarik pada hasil yang dihasilkan oleh *agent*. Oleh karena itu teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pascakeputusan (Hendriksen, 1992). Peran ini seringkali diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada *principal* tentang kejadian-kejadian dalam periode lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai peramalannya (Hendriksen, 1992).

Namun, ketika pemilik perusahaan dengan pihak manajemen memiliki kepentingan yang berbeda, dapat diartikan dengan ingin memaksimalkan kesejahteraan masing-masing, maka timbullah konflik keagenan. Jensen dan Meckling menyatakan, "*If both parties to the relationship are utility maximizers, there is a good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal (Jensen dan Meckling, 1976).*"

Jika Jensen dan Meckling menyatakan tentang adanya pemaksimalan utilitas, Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa terdapat dua permasalahan yang mungkin muncul dalam hubungan keagenan. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa masalah keagenan muncul ketika, yang pertama, tujuan dari *principal* dan agen bertentangan dan adanya kesulitan bagi *principal* untuk menverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Kedua, adalah permasalahan pembagian risiko yang mungkin muncul ketika *principal* dan agen memiliki perilaku berbeda terhadap risiko.

Eisenhardt (1989) menyatakan hubungan antara teori keagenan dengan *human behavior*. Teori Keagenan menggunakan tiga asumsi *human behavior* yaitu keterbatasan rasionalitas, oportunisme, dan menghindari risiko.

Dalam Teori Keagenan, terdapat dua konflik potensial kepentingan yang mungkin muncul yaitu konflik antara *shareholder* dengan manager dan *shareholder* dengan *bondholder*. Untuk mengatasi atau meminimalisasi konflik keagenan tersebut akan menimbulkan biaya. Biaya ini yang disebut dengan biaya keagenan. Dihubungkan dengan konflik keagenan, konflik antara *shareholder* dengan manager akan meningkatkan biaya keagenan terhadap ekuitas. Sedangkan konflik antara *shareholder* dengan *bondholder* akan meningkatkan biaya keagenan terhadap hutang. Biaya agensi tersebut terdiri dari *residual loss*, *bonding expenditure* oleh agen, dan *monitoring expenditure* oleh *principal*.

2.2 Earning Management

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan manager dengan memanfaatkan adanya asimetri informasi dan munculnya perilaku oportunistik untuk memaksimalkan kesejahteraan adalah dengan cara memodifikasi laba atau dikenal dengan istilah manajemen laba (*earning management*).

Ada beberapa pendapat mengenai definisi dari *earning management*. Scott (2003) mendefinisikan *earning management* atau manajemen laba sebagai suatu pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Dengan mengacu pada teori keagenan, tindakan manajemen laba merupakan salah satu bentuk *moral hazard* yang dilakukan pihak manajemen yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajemen seperti pemberian bonus, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, dan menghindari biaya politik.

Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008), terdapat tiga hipotesis utama dalam *Positive Accounting Theory* dapat dijadikan dasar dalam pengembangan motivasi manajemen laba yaitu:

a. Bonus Plan Hypothesis

Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa manager dalam perusahaan yang merencanakan bonus akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan.

b. Debt (Equity) Hypothesis

Debt (Equity) Hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio *debt to equity* lebih luas, managernya akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dalam konteks perjanjian hutang, manager akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda hingga tahun berikutnya.

c. *Political Cost Hypothesis*

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa daripada perusahaan kecil, perusahaan yang lebih besar akan cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya adalah undang-undang yang mengatur besarnya pajak yang ditarik sesuai dengan prosentase laba yang diperoleh.

Menurut Scott (2000) dalam Andayani (2010) terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management* antara lain motivasi bonus, motivasi kontrak motivasi politik motivasi pajak, pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) dan penawaran saham perdana (IPO). Terdapat beberapa pola dalam melakukan *earning management* yaitu *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization* dan *income smoothing* (Scott (2000) dalam Andayani (2010)).

Tindakan *earning management* yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dapat berakibat berkurangnya kredibilitas laporan keuangan sebagai media komunikasi antara penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan guna dalam pengambilan keputusan.

Penyajian Kembali Laporan Keuangan (Restatement)

Dalam penyajian laporan keuangan, tidak jarang akuntan akan menemukan hal-hal yang memerlukan perubahan yang perlu untuk direvisi sehingga laporan keuangan perlu disajikan kembali. Perubahan-perubahan tersebut bisa disebabkan karena kesalahan perhitungan, perubahan kebijakan akuntansi, penerapan peraturan baru, hingga karena kelalaian dan kecurangan yang dilakukan pihak manajemen.

Berdasarkan PSAK no. 25 tentang “Laba atau Rugi Bersih Periode Berjalan, kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi” terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penyajian kembali laporan keuangan, khususnya pada Laporan Laba Rugi. Faktor utama penyajian kembali laporan keuangan sehingga laporan keuangan harus disajikan secara retrospektif adalah jika manajemen perusahaan melakukan kesalahan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan pada periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan dan jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (Bapepam, 2000).

Tindakan *restatement*, terutama *earning restatement*, mulai menarik perhatian beberapa peneliti sejak skandal-skandal akuntansi yang dilakukan oleh *massive companies* terkuak. Agrawal dan Chada (2005) menyatakan adanya relevansi tentang ketidakandalan laba yang dilaporkan yang terus meningkat, dibuktikan dengan kekhawatiran yang disebabkan karena meningkatnya frekuensi *earning restatement* oleh perusahaan beberapa tahun terakhir. Lemahnya pengawasan internal ditengarai sebagai penyebab dari meluasnya kegagalan pelaporan keuangan ini.

Lebih jauh, Zoe-Vonna Palmrose dan Susan (2004) dalam Agrawal dan Chada (2005) juga menjelaskan tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dengan *earning restatement*. Yang pertama, tidak seperti manajemen laba yang mana banyak perusahaan mungkin terikat rutin dengan kegiatan ini dalam berbagai derajat, kesalahan penyajian laba merupakan kejadian yang langka dan merupakan kejadian serius dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang setelah melakukan *restatement* selanjutnya berakhir dengan kebangkrutan. Yang kedua, pengukuran dari *earning restatement* adalah suatu konstruksi yang akademis, “tak ada asap tanpa api”, hal ini menunjukkan bahwa laba memang dimanipulasi oleh

manajer. Dari penjelasan tersebut, tindakan earning restatement dianggap sebagai tindakan manajemen laba yang agresif (Lin et al., 2006).

2.3 Good Corporate Governance

Isu corporate governance sudah lama dikenal di Negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Arifin, 2005). Konsep pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam Teori Agensi.

Konsep Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager dkk., 2003 dalam Arifin, 2005). Menurut Cadbury Committee, Corporate Governance adalah:

“Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of their companies. The shareholders’ role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure in place.”

Sedangkan KNKG mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut KNKG dalam Pedoman Umum Good Governance, terdapat lima asas dalam menerapkan GCG, yaitu transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), independensi (*Independency*) dan kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Menurut IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) dalam Trihartati (2008), terdapat tujuh dimensi GCG yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan OECD dan Komnas GCG. Tujuh dimensi tersebut adalah komitmen terhadap tata kelola perusahaan, tata kelola dewan komisaris, komite-komite fungsional, dewan direksi, transparansi dan akuntabilitas, perlakuan terhadap pemegang saham dan peran pihak berkepentingan lainnya. Salah satu

komite fungsional dalam dimensi penerapan GCG tersebut adalah komite audit (Trihartati, 2008).

2.4 Komite Audit

Salah satu alat untuk menerapkan *Good Corporate Governance* adalah dengan adanya komite audit yang efektif. Beberapa peraturan yang mengatur keberadaan Komite audit adalah sebagai berikut Surat Edaran BAPEPAM SE03/PM/2000 yang selanjutnya keanggotaannya dijabarkan dalam Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE008/BEJ/12-2001, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Pedoman Good Corporate Governance.

Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang, dimana Ketua Komite Audit tersebut berasal dari komisaris dan merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat (Bapepam, 2001).

Secara garis besar tugas dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review system* pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IKAI, 2004). KNKG menetapkan tiga garis besar dari tujuan dibentuknya Komite Audit, yaitu: (1). Pelaporan Keuangan, (2). Manajemen risiko dan control dan (3). *Corporate Governance*.

2.4.1 Karakteristik Komite Audit

2.4.1.1 Independensi Komite Audit

Independensi adalah faktor yang penting dalam komite audit. Dengan independensinya, komite audit diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan (Agrawal *et al.*, 2005), serta dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas fungsi internal audit, independensi dan obyektifitas eksternal auditor yang melakukan audit (IKAI, 2004).

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor SE008/BEJ/12-2001, independensi dapat diartikan sebagai pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan afiliasi dengan: (1). Perusahaan tercatat, (2). Komisaris, (3). Direksi dan (4). Pemegang saham utama perusahaan tercatat, dan mampu memberikan pendapat professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2.4.1.2 Ukuran Komite Audit

Ukuran suatu komite audit dapat dilihat dari jumlah keanggotaan komite audit termasuk ketua komite audit. Jumlah efektif yang direkomendasikan KNKG adalah 3-5 orang (KNKG, 2002). Namun demikian, berbeda dengan KNKG, penelitian Carcello et al., (2008) menggunakan rentang efektif sebesar 6-9 anggota dengan alasan untuk keanggotaan yang besar akan mengalami adanya *free-rider* dan masalah koordinasi, sedangkan untuk keanggotaan kecil dapat mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pendistribusian tugas. Braiotta (2000) dalam Abbott et al.,(2002) menyatakan bahwa, “Secara umum, komite audit seharusnya cukup luas untuk memiliki anggota dengan bauran pertimbangan bisnis dan pengalaman yang baik. Cukup luas, tetapi tidak memberatkan.”

2.4.1.3 Keahlian Keuangan Komite Audit

Karena laporan keuangan adalah objek *oversight* komite audit, selain independensi, keahlian di bidang akuntansi dan keuangan juga menjadi perhatian bagi media dan regulator. Dengan adanya keahlian keuangan, komite audit diharapkan dapat menguatkan dan meyakinkan adanya sistem internal kontrol perusahaan yang baik yang selanjutnya ikut berkontribusi dalam keandalan dan relevansi pelaporan keuangan (Qin, 2007).

Dalam suatu komite audit, paling tidak satu orang anggotanya diharapkan memiliki keahlian di bidang keuangan, paling tidak dalam membaca suatu laporan keuangan. Tanpa adanya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, komite audit akan kurang mampu dalam mendeteksi masalah dalam pelaporan keuangan (Agrawal, 2005).

Abbott, Parker, dan Peters (2004) mendefinisikan keahlian keuangan sebagai CPA, *investment banker*, *venture capitalist*, CFO, *controller*, atau seseorang yang pernah memegang posisi manager senior (CEO, President, EVP, SVP, VP) dengan tanggung jawab keuangan.

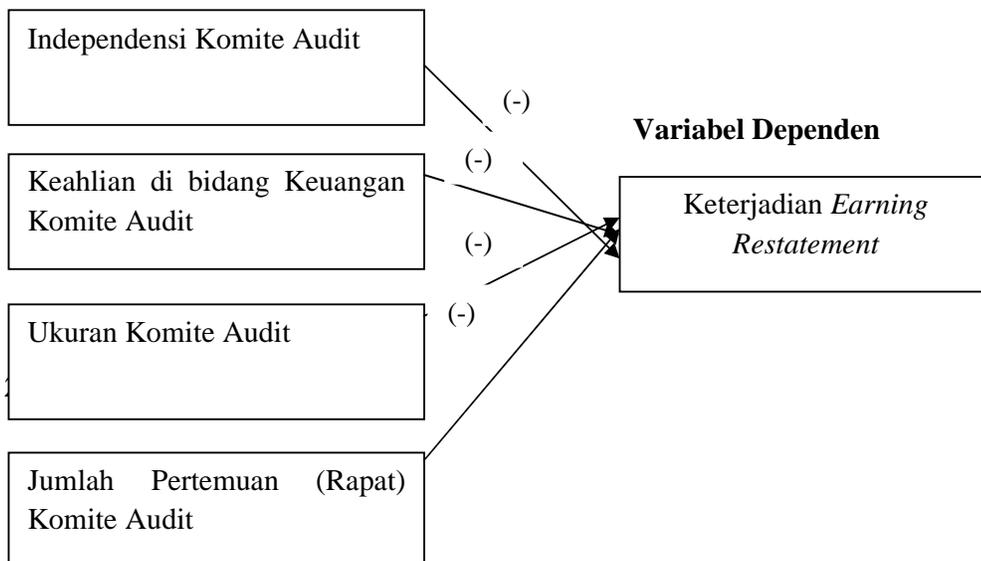
2.4.1.4 Pertemuan Komite Audit

Komite Audit mengadakan pertemuan rapat setidaknya tiga bulan sekali. Salah satu bahasan yang dibahas dalam pertemuan ini adalah bahasan tentang fungsi komite audit dalam mengawasi fungsi auditor internal perusahaan (IKAI, 2007). Dalam suatu pertemuan rapat komite audit, komite audit dapat juga berdiskusi langsung dengan pihak lainnya seperti auditor internal, auditor eksternal maupun pihak manajemen. Setidaknya setiap tahun komite audit yang diwakili oleh Ketua Komite Audit akan menyampaikan laporan tahunan mereka kepada Dewan Komisaris.

Pertemuan efektif komite audit secara teratur untuk menjamin proses pelaporan berfungsi secara tepat, dan oleh karena itu komite audit yang berfungsi dengan baik dan aktif mungkin mampu untuk mencegah manajemen laba (Zhou et. al., 2004).

2.5 Kerangka Pemikiran

Variabel Independen



2.6.1 Independensi Komite Audit dan Keterjadian *Earning Restatement*

Syarat utama anggota komite audit adalah adanya independensi komite audit. Independensi diperlukan untuk menilai keefektifan auditor internal dan untuk menilai independensi dan objektivitas auditor eksternal. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara independensi komite audit dengan keterjadian *earning restatement*. Untuk menguji hubungan tersebut, dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara independensi komite audit terhadap keterjadian earning restatement.

2.6.2 Ukuran Komite Audit dan Keterjadian *Earning Restatement*

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Menurut KNKG, untuk membangun komite audit yang efektif, rentang jumlah anggota yang diperlukan adalah 3 – 5 orang. Sedangkan menurut Carcello et al., (2008) rentang yang efektif adalah sebesar 6 – 9 orang, karena komite audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat hasil yang tidak konsisten. Xie et al. (2003) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara jumlah anggota komite audit dengan manajemen laba. Seperti halnya Xie, Abbott et al. (2004) juga tidak menemukan adanya dampak ukuran komite audit terhadap *earning restatement*. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian sebelumnya, Yang dan Krishnan (2005) menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba.

Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit dengan keterjadian *earning restatement*, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara ukuran komite audit dengan keterjadian earning restatement.

2.6.3 Keahlian di Bidang Keuangan dan keterjadian *Earning Restatement*

Laporan keuangan merupakan objek oversight dari komite audit. Oleh karena itu dalam suatu keanggotaan komite audit harus terdapat sekurang-kurangnya satu anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan. Hal ini diperlukan supaya komite audit mampu mendeteksi adanya masalah dalam pelaporan keuangan, termasuk mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan manajemen yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Untuk menguji hubungan antara *financial expertise* komite audit dengan keterjadian *earning restatement*, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara keahlian keuangan komite audit dengan keterjadian earning restatement.

2.6.4 Jumlah pertemuan (rapat) Komite Audit dengan Keterjadian *Earning Restatement*

Dalam melakukan fungsi komite audit sebagai pengawas, baik itu pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko dan kontrol juga penegakan *corporate governance*, komite audit akan memerlukan pertemuan-pertemuan untuk membahas temuan-temuan yang perlu dievaluasi. Pertemuan ini dilakukan paling sedikit tiga bulan sekali, dan setahun sekali komite audit akan melaporkan kinerjanya kepada Dewan Komisaris. Adapun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan komite audit antara lain pihak auditor eksternal, auditor internal, dan pihak manajemen.

Jumlah pertemuan (rapat) komite audit juga digunakan sebagai parameter keaktifan komite audit. Semakin sering komite mengadakan pertemuan diharapkan akan menurunkan tingkat kecurangan pada manajemen. Untuk menguji hubungan pertemuan komite audit dengan keterjadian *earning restatement*, maka dituliskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara jumlah pertemuan (rapat) komite audit dengan keterjadian earning restatement.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Dependent Variable (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah adanya keterjadian penyajian kembali laba (*earning restatement*) pada perusahaan *go public* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Earning restatement* ini merupakan proksi dari manajemen laba.

Variabel terikat dalam penelitian ini merupakan variabel dummy karena terdiri dari dua kategori, yaitu untuk perusahaan yang melakukan *earning restatement* akan diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang tidak melakukan *earning restatement* diberi kode 0.

3.1.2. Variabel Bebas (Independent variable)

3.1.2.1. Independensi Komite Audit (INDD)

Variabel ini merupakan variabel dummy. Nilai “1” digunakan jika seluruh anggota komite audit adalah independen dan nilai “0” jika tidak semua anggota komite audit adalah independen.

3.1.2.2. Ukuran Komite Audit (SIZE)

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Pengkodean ukuran komite audit nilai “1” jika jumlah komite audit antara 3-5 orang (yang merupakan rekomendasi jumlah efektif oleh KNKG) dan nilai “0” jika tidak.

3.1.2.3. Keahlian di Bidang Keuangan (FINEX)

Variabel keahlian dibidang keuangan ini merupakan variabel dummy. Pemberian kode “1” digunakan jika dalam suatu komite audit terdapat setidaknya satu orang anggota yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang keuangan. Sedangkan pemberian kode “0” jika tidak ada anggota dalam komite audit tersebut yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang keuangan.

3.1.2.4. Frekuensi Pertemuan (Rapat) Komite Audit

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah pertemuan (rapat) komite audit dalam satu tahun atau satu periode.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1. Auditor Big 4 dan non-Big 4

Becker et.al (1998) dalam Lin et al., (2006) pada penelitiannya berasumsi bahwa klien auditor non Big 4 lebih memungkinkan melakukan tindakan manajemen laba daripada klien yang menggunakan auditor Big 4.

Variabel ini merupakan variabel dummy, pemberian kode “1” untuk auditor Big 4 dan kode “0” untuk auditor non Big 4.

3.1.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Operasi/Cash Flow Operating Activity (CFO), Total Accrual (TAcc), Absolute Value CFO dan Absolute Value Total Accrual

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan variabel tersebut untuk mengontrol faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi insentif manajemen untuk mengelola atau memanipulasi laba yang dilaporkan (Dechow et al., 1995; Frankel et al., 2002; McNichols, 2000). Matsumoto (2002) dalam Lin et al., (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang tinggi akan lebih sering mengatur labanya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang *listed* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2009. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan perusahaan yang menyajikan kembali (*restate*) laporan laba ruginya pada periode 2005-2009.
2. Sampel disaring berdasarkan ketersediaan data komite audit yang diperlukan dimana data tersebut terdapat dalam laporan tahunan perusahaan tahun bersangkutan.

3. Sampel perusahaan yang melakukan *restatement* kemudian dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement* berdasarkan klasifikasi industri dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan menggunakan total asset sebagai ukurannya. Ukuran perusahaan dan klasifikasi industri dapat diperoleh dari *idx statistic* yang tersedia di BEI ataupun Pojok BEI.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan (*financial statement*) perusahaan tercatat dan laporan tahunannya (*annual report*) periode 2005-2009. Data tersebut diperoleh dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, situs perusahaan yang bersangkutan atau tersedia juga di Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengolah literatur, jurnal, artikel, dan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis data

Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara *independent variable* terhadap perusahaan yang melakukan *earning restatement* dengan perusahaan yang tidak melakukan *earning restatement*.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan variabel independensi komite audit, ukuran komite audit, *financial expertise* komite audit dan jumlah pertemuan (rapat) komite audit.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian seluruh hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik (*regression logistic*) karena variabel terikatnya merupakan variabel satu non metric dua kategori (Ghozali, 2006). Pada logistik regresi ini tidak diperlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya.

Persamaan yang dibentuk dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} RESTATE = & \beta_0 + \beta_1 INDP + \beta_2 SIZE + \beta_3 FINEX + \beta_4 MEET + \beta_5 BIG \\ & + \beta_6 CFO + \beta_7 ABSCFO + \beta_8 TACC + \beta_9 ABSTACC + \varepsilon \end{aligned}$$

Dimana

RESTATE = Nilai 1 jika perusahaan melakukan penyajian kembali laporan laba ruginya, dan nilai 0 jika tidak.

INDP = Nilai 1 jika seluruh anggota komite audit adalah independen, dan nilai 0 jika tidak.

SIZE = Nilai "1" jika jumlah komite audit antara 3-5 orang yang merupakan rekomendasi jumlah efektif oleh KNKG dan nilai "0" jika tidak.

FINEX = Nilai 1 jika terdapat minimal satu orang anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang keuangan, dan 0 jika tidak ada anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

MEET = Jumlah rapat komite audit selama satu tahun atau satu periode.

BIG = Nilai 1 jika auditor independen perusahaan tersebut berasal dari kantor akuntan Big 5, dan nilai 0 jika tidak.

CFO = adalah nilai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan

ABSCFO = merupakan nilai absolut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan.

TACC = merupakan nilai total akrual perusahaan (*net income-CFO*).

ABSTACC = merupakan nilai absolute dari nilai Total Akrual

perusahaan.

ε = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Independensi Komite Audit

			Restate		Total
			Tidak Restatement	Restatement	
INDP	Tidak	Jumlah	1	15	16
		Persentase dari Restate	5%	75%	40%
	Independen	Jumlah	19	5	24
		Persentase dari Restate	95%	25%	60%
Total		Jumlah	20	20	40
		Persentase dari Restate	50%	50%	100%

Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit

			Restate		Total
			Tidak Restatement	Restatement	
SIZE	Tidak efektif	Jumlah	0	3	3
		Persentase dari Restate	0%	15%	7.5%
	Efektif	Jumlah	20	17	37
		Persentase dari Restate	20%	85%	92.5%
Total		Jumlah	20	20	40
		Persentase dari Restate	50%	50%	100%

Statistik Deskriptif *Financial Expertise* Komite Audit

	Restate	Total

		Tidak Restatement	Restatement		
FINEX	Tidak ada	Jumlah	0	1	1
		Persentase dari Restate	0%	5%	2.5%
	Ada	Jumlah	20	19	39
		Persentase dari Restate	100%	95%	97.5%
Total		Jumlah	20	20	40
		Persentase dari Restate	50%	50%	100%

Statistik Deskriptif Pertemuan (rapat) Komite Audit

	RESTATE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MEET	Restate	20	12.00	9.308	2.081
	Tidak Restate	20	10.40	9.052	2.024

Statistik Deskriptif Tipe Auditor

		Restate		Total	
		Tidak Restatement	Restatement		
BIG 4	Non Big 4	Jumlah	6	10	16
		Persentase dari Restate	30%	50%	40%
	Big 4	Jumlah	14	10	24
		Persentase dari Restate	70%	50%	60%
Total		Jumlah	20	20	40
		Persentase dari Restate	50%	50%	100%

Statistik Diskriptif Variabel Kontrol Arus Kas Operasi dan Total Akrua

RESTATE	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	
CFO	Tidak Restatement	20	940757288862	2371776172061	530345274814
	Restatement	20	1816802648028	4833555629313	1080815896017
TACC	Tidak Restatement	20	-155491498064	1597331363409	357174151117
	Restatement	20	-923776494782	3257222031972	728336988130
ABSCFO	Tidak Restatement	20	1461540975917	2075668149144	464133508022
	Restatement	20	2232494642067	4646655453188	1039023746135
ABSTACC	Tidak Restatement	20	742288104336	1413126465244	315984683709
	Restatement	20	1462320531982	3042506285309	680325087592

4.1 Pengujian Hipotesis

Hasil uji regresi logistik

Variabels in The Equation

		B	S.E	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	INDP	-8.495	3.701	5.268	1	.022	.000
	FINEX	-15.516	40192.9	.000	1	1.000	.000
	SIZE	-92.737	7660	.000	1	.990	.000
	MEET	.215	.139	2.368	1	.124	1.239
	BIG4	2.822	2.142	1.736	1	.188	16.806
	CFO	.000	.000	1.954	1	.162	1.000
	TACC	.000	.000	.184	1	.668	1.000
	ABSCFO	.000	.000	2.500	1	.114	1.000
	ABSTACC	.000	.000	.770	1	.380	1.000
	Constant	112.101	40916.36	.000	1	.997	4.841E48

Bentuk persamaan regresi logistic dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln \frac{p}{1-p} = & 112.101 - 8.494 \text{ INDP} - 15.515 \text{ FINEX} - 92.736 \text{ SIZE} \\ & + 0.214 \text{ MEET} + 2.821 \text{ BIG4} + 0.000000000018 \text{ CFO} \\ & + 0.0000000000045 \text{ TACC} - 0.000000000022 \text{ ABSCFO} \\ & + 0.0000000000097 \text{ ABSTACC} + e \end{aligned}$$

4.2 Pembahasan

Independensi Komite Audit dan *Earning Restatement*

Hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara independensi komite audit terhadap keterjadian *earning restatement*. Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel independensi yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,022. Dengan demikian hipotesis satu tidak dapat ditolak.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Klein (2002) dan Trihartati (2008), Namun tidak mendukung penelitian Lin et al. (2006). Walaupun menggunakan proksi yang berbeda, penelitian Klein (2002) dan Trihartati (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen laba.

Menurut Trihartati (2008), independensi merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Kinerja komite audit menjadi efektif jika anggotanya memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan pendapatnya. Dengan independensi yang baik, komite audit diharapkan dapat lebih objektif dalam melakukan penilaian baik untuk pihak internal perusahaan maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung rekomendasi Bapepam.

Ukuran Komite Audit dan *Earning Restatement*

Hipotesis 2 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara ukuran komite audit dengan keterjadian *earning restatement*. Hasil analisis regresi logistik juga menyatakan bahwa antara variabel ukuran

komite audit dengan *earning restatement* memiliki arah negatif namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Lin et al. (2006).

Dalam peraturannya, Bapepam mensyaratkan bahwa jumlah keanggotaan minimal dalam suatu komite audit adalah 3 orang anggota termasuk dengan ketua komite audit. Sedangkan KNKG dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif merekomendasikan bahwa untuk mengefektifkan komite audit, jumlah keanggotaannya berjumlah antara 3-5 orang. Walaupun demikian, ternyata jumlah tersebut belum mampu mengurangi tindakan manajemen laba dalam suatu perusahaan. Menurut Klein (2002a) dan Boone et al., (2007) dalam Carcello et al., (2008) komite audit dengan jumlah yang kecil (sedikit) mungkin akan mengalami kekurangan sumber daya untuk mendistribusikan tugas komite audit yang telah diamanatkan dan untuk mengawasi operasi perusahaan yang lebih besar dan lebih kompleks. Dengan sedikitnya sumber daya yang ada dan kurangnya pengawasan, kemungkinan terdapat kesalahan atau bahkan kecurangan dari pihak manajemen yang tidak terdeteksi. Hal ini yang menyebabkan ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Financial Expertise dan Earning Restatement

Hipotesis 3 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara keahlian keuangan komite audit dengan keterjadian *earning restatement*. Hasil regresi logistik dengan nilai signifikansi sebesar 1,000 dan nilai koefisien variabel sebesar -17,085 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel dependennya adalah negatif namun tidak signifikan. Penelitian ini mendukung penelitian dari Lin et al., (2006) dan Trihartati (2008).

Dengan adanya anggota yang memiliki *financial expertise*, komite audit diharapkan mampu mendeteksi serta mengurangi tindakan manajemen laba. Dalam peraturan Bapepam pun, hal ini telah dibakukan sebagai salah satu syarat terbentuknya komite audit. Namun, walaupun hampir seluruh perusahaan terdaftar di BEI juga telah mematuhi peraturan ini, penelitian ini menunjukkan bahwa *financial expertise* belum secara signifikan mampu mengurangi tindakan *earning management*. Menurut Khomsiyah (2005) dalam Trihartati (2008), hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pembentukan komite audit yang

mempunyai keahlian di bidang keuangan hanya didasarkan pada peraturan yang berlaku. Selain itu, peraturan yang diberikan oleh Bapepem belum mendefinisikan *financial expertise* secara jelas. Hal ini dapat menjadikan kontroversi tersendiri bagi masing-masing individu untuk mendefinisikan tentang apa yang standar seseorang dapat dikatakan memiliki *financial expertise* atau profesi seperti apa yang bisa mencerminkan bahwa seseorang itu memiliki keahlian dibidang keuangan (Qin, 2007).

Pertemuan (Rapat) Komite Audit dan *Earning Restatement*

Hipotesis 4 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara jumlah pertemuan (rapat) komite audit dengan keterjadian *earning restatement*. Regresi logistik memberikan nilai koefisien variabel sebesar 0.215 dan nilai signifikansi sebesar 0.124 untuk variabel independen pertemuan (rapat) komite audit. Dari hasil tersebut tampak bahwa variabel independen ini memiliki arah positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependennya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Lin et al., (2006) dan Trihartati (2008).

Rapat komite audit juga merupakan indikator keaktifan komite audit. Komite audit yang aktif diharapkan mampu untuk mengurangi tindakan manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa pertemuan (rapat) komite audit belum mampu untuk mengurangi manajemen laba. Menurut Trihartati (2008), hal ini disebabkan karena pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat mandatori terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut menyebabkan komite audit belum berfungsi secara efektif. Hal ini menjadi lebih parah jika dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh anggota komite audit secara lengkap dan tidak dihadiri oleh pihak yang mungkin juga berkepentingan seperti pihak manajemen atau auditor eksternal.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat bukti empiris bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*.
2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*.
3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keahlian di bidang keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*.
4. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertemuan (rapat) komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterjadian *earning restatement*.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah sampel penelitian yang terbatas karena *earning restatement* merupakan kejadian yang tidak terjadi pada semua perusahaan.
2. Banyak laporan tahunan yang informasi mengenai komite auditnya tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan sampel.
3. Tidak semua perusahaan yang melakukan *earning restatement* dapat dipasangkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *restatement*. Contohnya, terdapat perusahaan tunggal di suatu sektor dan terdapat pula perusahaan yang tidak memiliki penanding karena total asetnya yang begitu besar.

5.3 Saran

1. Untuk Bapepam, penjabaran peraturan lebih dijelaskan lagi dan pengawasan mengenai komite audit lebih dioperasionalkan dan diperketat.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sampel yang digunakan diharapkan dapat lebih banyak. Selain itu pengujian variabel juga bisa menggunakan variasi yang berbeda atau dengan menambahkan karakteristik komite audit yang lain seperti komposisi dewan komisaris yang ikut tergabung dalam komite audit atau komitmen waktu komite audit.

REFERENSI

- Abbott, L.J, Y Park. dan S Parker. 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance*. Vol. 26. Pp. 55-67.
- Abbott, Lawrence J. Susan Parker dan Gary F Peters. 2002. Audit Committee Characteristics and Financial Misstatement: A Study of the Efficacy of Certain Blue Ribbon Committee Recommendations. *Journal of Financial Economics*. <http://papers.ssrn.com>. diakses tanggal 26 April 2011.
- Agrawal, Anup dan Sahiba Chadha. 2005. Corporate Governance and Accounting Scandals. *Journal of Law and Economics*. Vol. XLVIII. pp. 371-406.
- Andayani, Tutut Dwi. 2010. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba". *Tesis Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Arifin. 2005. "Peran Akuntansi Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)". *Disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.
- Bank Indonesia. 2006. *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Jakarta.
- Bapepam. 2002. *Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta
- Bapepam. 2004. *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta.
- Bapepam. 2004. *Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*. Jakarta.
- BEJ. 2001. *Keanggotaan Komite Audit*. Jakarta.
- Bloom, Robert dan Pieter T Elgers. 1987. *Accounting Theory & Policy: a Reader*. 2nd Edition.. Orlando Harcourt Brace.
- Carcello, Joseph V. Carl W Hollingsworth. April Klein dan Terry L Neal. 2008. *Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance*

Mechanisms, and Earnings Management in a Post-SOX World. *Working Paper*.

- Effendi, Muh. Arief. 2005. Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 1, pp 51-57.
- Eisenhardt, K.M. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. Academy of Management Review. Januari. Pp 57-74.
- Ghozali, I. dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriksen, Eldon S. dan Michael F van Breda. 1992. *Accounting Theory*. 5th Edition. Irwin McGraw-Hill: Southern Methodist University.
- IKAI. 2004. *Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dalam Proses GCG: Sosialisasi Manual Komite Audit*. <http://komiteaudit.org/index.htm>. diakses tanggal 10 Maret 2011.
- Jensen, M. C. dan W H Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Oktober. Vol.3. pp 305-360.
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara. 2002. *Pemembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2007. *Intermediate Accounting*. 12th Edition. Wiley.
- Klein, April. 2002. Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 33. Pp. 375-400.
- Komite Nasional Corporate Governance. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.google.com> diakses pada tanggal 12 Mei 2011.

- Lin, Jerry W. June F Li. dan Joon S Yang. 2006. The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21. No. 9. pp. 921-933.
- Purwati, Atiek Sri. 2006. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ". *Tesis Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Putra, I Nyoman W. A. 2006. *Manajemen Laba: Perilaku Manajemen Opportunistic atau Realistic?*. <http://www.google.com>. diakses tanggal 7 Maret 2011.
- Qin, Bo. 2007. The Influence of Audit Committee Financial Expertise on Earnings Quality: U.S Evidence. *The Icfai Journal of Audit Practice*. <http://papers.ssrn.com>. diakses pada tanggal 26 April 2011.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis I: Research Methods for Bussiness*. 4 Edisi/v.1, jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Suaryana, Agung. 2005. "Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba". *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 15-16 September 2005*.
- Sulistyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)*. Jakarta: Grasindo.
- Tempo. 2002. *Bapepam: Kasus Kimia Farma Kesalahan Manajemen Lama*. Tempo edisi Kamis 21 November 2002.
- Trihartati, Aprillya dan Sugeng Pamudji. 2008. Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). <http://ejournal.undip.ac.id>. diakses tanggal 26 April 2011.
- Trybou, Jeroen; Paul Gemmel dan Lieven Annemans. 2010. An Interative Model of the Management of Hospital Physician Relationships. *Working Paper*.
- Xie, B. Wallace N Davidson III dan Peter J DaDalt. 2001. Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee. <http://papers.ssrn.com>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2011.

Zhou, Jian dan Ken Y Chen. 2004. Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks. *Unpublished Manuscript*.